PENGARUH TERJADINYA TRAGEDI ANGKE TAHUN 1740 TERHADAP BIDANG SOSIAL-EKONOMI DI BATAVIA

Ardhi Yudisthira, Tontowi Amsia, dan Syaiful M.

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, faximile (0721) 704 624

e-mail: uthisthira@yahoo.co.id

The purpose of this research is to know the effect from Angke Tragedy in 1740, against social-economy sector in Batavia. This research method uses historical methods. The data collecting techniques used documentation and bibliography. The techniques of data analysis in this research is the technique of qualitative data analysis. The results of this research indicate that the effect from Angke's Tragedy, have a detrimental effect to socio-economy sector in Batavia. The effects are, reduction of chinese citizens as an important social class in Batavia, shortages food in Batavia, the reduced sugar export commodities in Batavia, and the decline in *pacht* (tax) revenue in Batavia because many Chinese people are killed and disappeared as a result of the tragedy.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaruh dari terjadinya Tragedi Angke tahun 1740 terhadap bidang sosial-ekonomi di Batavia. Metode penelitian ini menggunakan metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dari terjadinya Tragedi Angke telah memberikan pengaruh buruk pada bidang sosial-ekonomi di Batavia. Pengaruh tersebut yaitu, berkurangnya masyarakat Tionghoa sebagai kelas sosial yang sangat penting di Batavia, terjadinya kekurangan pangan di Batavia, berkurangnya komoditas ekspor gula di Batavia dan terjadinya penurunan pemasukan *pacht* (pajak) di Batavia karena banyaknya warga Tionghoa yang terbunuh dan menghilang akibat tragedi tersebut.

Kata kunci: batavia, pengaruh, sosial-ekonomi.

PENDAHULUAN

Orang Cina sudah berdagang di Jayakarta jauh sebelum kemunculan VOC. Bahkan sudah ada yang cukup lama menetap di wilayah tersebut untuk menanam tebu dan menyuling arak yang terkenal di kalangan para pelaut. Ketika VOC mulai menjejakkan kakinya di wilayah ini, perusahaan tersebut (VOC) pun menjalin hubungan baik dengan Orang Cina. (Blackburn, 2011: 33). Sejak masa Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen

(1627-1629), hubungan baik antara warga Tionghoa dengan VOC ini dapat terjalin dengan baik, hingga bertahun-tahun setelah Coen tak lagi menjabat sebagai gubernur jenderal. Bahkan warga Tionghoa memberikan penghargaan kepada Gubernur Jenderal Jacques Specx berupa sebuah medali dari emas. Akan tetapi semua berubah setelah makin banyaknya warga Tionghoa yang datang ke Batavia. (Wijayakusuma, 2005 : 78).

Pada masa pemerintahan Johannes Camphuijs (masa pemerintahan 1684-1691) tepatnya pada tanggal 21 Mei 1690, mulai dikeluarkan peraturan untuk membatasi masuknya orang Tionghoa ke Batavia/Jawa. Vermeulen mengungkapkan salah satu penyebab terbitnya peraturan Mei 1690 adalah “meningkatnya berbagai gerombolan Tionghoa di Batavia.” Mereka tidak meninggalkan Tiongkok sebagai pedagang atau memiliki ketrampilan tetapi melakukan “banyak tipuan kasar, pencurian, penipuan, dan tindakan tidak pantas lainnya.” (Vermeulen, 2010: 25).

Sampai dengan awal abad ke 18, hubungan dagang antara Batavia dan Tiongkok bertambah penting. Akan tetapi kondisi ekonomi Batavia pasca 1725 terus memburuk. Buku-buku akuntansi menunjukkan kerugian modal yang terjadi selama beberapa tahun berturut-turut. (Vermeulen, 2010: 35). Sebagaimana yang dijelaskan oleh J.L. Blusse pada tahun 1988 yaitu :

Habisnya sumber daya tanah dan hutan telah menekan industri ini (gula) dan kemudian ditambah lagi dengan kemunduran ekspor karena telah ditutupnya pasar Persia yang menguntungkan itu. Yang paling dirugikan adalah orang Cina. Hampir semua pabrik gula dimiliki orang Cina dan dikerjakan orang-orang Cina, terutama oleh para imigran yang baru datang ke Batavia. Sebagian besar komunitas Cina juga tergantung secara langsung maupun tidak langsung pada industri ini. (Rommelink, 2002: 153).

Jumlah imigran Cina yang terus meningkat membuat VOC menerapkan berbagai peraturan guna membatasi jumlah orang Cina di Batavia.

Di antaranya pada tanggal 10 Juni 1727, diputuskan untuk memulangkan semua orang Tionghoa yang telah menetap di Batavia selama 10-12 tahun, tetapi tidak dapat menunjukkan surat izin tinggal. Vermeulen mengungkapkan bila setiap orang Tionghoa yang tidak memiliki izin semacam ini setelah tanggal kadaluarsanya akan dianggap “orang yang memasuki koloni secara ilegal dan

sembunyi-sembunyi atau disembunyikan.” (Vermeulen, 2010: 38-39).

Sejak akhir tahun 1739 dan 1740 mulai muncul ketidakpuasan dan kekhawatiran di kalangan orang Cina yang tinggal di Batavia terhadap perlakuan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan VOC. Puncaknya adalah dikeluarkannya resolusi tanggal 25 Juli 1740, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Adrian Valckenier. Pelaksanaan resolusi ini menimbulkan ketegangan yang terjadi di kalangan Tionghoa di luar dan di dalam Batavia. (Vermeulen, 2010: 43-44). Willem Remmelink mengungkapkan :

Resolusi ini memerintahkan bahwa semua orang Tionghoa yang mencurigakan tanpa peduli mereka memiliki surat izin atau tidak, harus ditangkap dan diperiksa. Apabila mereka ternyata tidak mempunyai penghasilan atau menganggur, mereka akan dipulangkan ke Tiongkok atau dibuang ke Ceylon (Sri Lanka) dan Tanjung Harapan untuk bekerja di perkebunan dan pertambangan sebagai kuli (Rommelink, 2002: 126).

Wijayakusuma menjelaskan bila warga Cina bertambah gelisah dan panik ketika muncul gosip bahwa orang-orang Cina itu sebenarnya ditenggelamkan ke laut. (Wijayakusuma, 2005 : 88). Isu ini memicu beberapa kelompok orang Cina di sekitar Batavia yang dipimpin oleh Khe Pandjang atau Wang Tai Pan untuk memberontak pada 7 Oktober 1740. Pemberontakan orang-orang Cina tersebut mengundang reaksi yang sangat keras dari VOC.

Pada malam tanggal 9 Oktober 1740 terjadi kebakaran terhadap warung-warung Tionghoa yang diartikan oleh VOC sebagai tanda dimulainya pemberontakan orang Tionghoa, sehingga yang terjadi kemudian adalah penjarahan, pembakaran rumah, dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang Tionghoa di Batavia. (Setiono, 2008 : 114-115).

Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740, ketika Valckenier memerintahkan agar semua pembunuhan dihentikan. Kondisi di dalam kota sudah reda, dan pengejaran terhadap warga Tionghoa yang memberontak di luar

tembok kota terhenti pada bulan November. Tragedi ini kemudian lebih dikenal dengan nama Geger Pecinan atau Tragedi Angke. Lebih dari 10.000 jiwa orang Tionghoa telah tewas akibat tragedi ini. (Wijayakusuma, 2005 : 115).

Peristiwa ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya bagi warga Tionghoa yang menjadi korban, tetapi juga berdampak buruk bagi VOC dan situasi di dalam dan di luar Batavia. Orang-orang Tionghoa yang selamat hanya berdiam diri di rumah sehingga kondisi perekonomian Batavia merosot tajam. Peristiwa ini menyebabkan terganggunya sistem distribusi dan kelangkaan barang secara besar-besaran di Batavia, karena status warga Tionghoa adalah sebagai pedagang perantara dalam sistem perdagangan di Batavia.

Peristiwa-peristiwa tadi kemudian memaksa VOC untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, akan tetapi kondisi serta kerugian-kerugian di Batavia belum dapat dipulihkan hingga beberapa tahun ke depan. Pemerintah Hindia-Belanda kembali menyadari pentingnya peran orang Tionghoa dalam kehidupan Batavia walaupun enggan untuk membiarkan orang Tionghoa tinggal di dalam kota. Mereka lantas mendirikan pemukiman khusus yang sejak saat itu menjadi pusat pecinaan Jakarta, yaitu di wilayah Glodok. (Wijayakusuma, 2005 : 114).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat diperlukan untuk menentukan data dan pengembangan suatu pengetahuan dan serta untuk menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan. Metode penelitian menurut Joko Subagyo merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan (P. Joko Subagyo, 2006: 1).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan, sehingga metode penelitian

sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis, karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Menurut Louis Gotschalk yang dimaksud dengan metode historis adalah : Sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis dimaksud untuk memberi secara efektif dalam mengumpulkan bahan-bahan sejarah. Menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya, biasanya dalam bentuk tertulis. (Gotschalk,1986:10).

Menurut Muhammad Nazir metode historis adalah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan perkembangan serta pengalaman di masa lampau, dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut (Mohammad Nasir, 2005 : 85).

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode historis adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan suatu data atau bahan yang telah ditulis yang berisi tentang peristiwa atau kejadian di masa lalu, yang disusun melalui proses ilmiah secara kronologi, sistematis dan saling berkaitan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menempuh penelitian ini mengikuti petunjuk dari Notosusanto sebagai berikut:

1. Heuristik, yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau.
2. Kritik, yaitu menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati baik isi maupun betuknya.
3. Interpretasi, yaitu menentukan makna saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh itu.
4. Historiografi, yaitu menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah. (Notosusanto, 2005 : 36).

Berdasarkan langkah-langkah metode sejarah yang diungkapkan oleh Nugroho

Notosusanto, maka dapat dijelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Heuristik, adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah. proses yang dilakukan penulis dalam heuristik adalah mencari sumber-sumber data dan fakta yang berasal dari pustaka yang dapat dijadikan literatur dalam penulisan.
2. Kritik, adalah menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah itu asli atau palsu dan apakah dapat digunakan atau sesuai dengan tema dalam penelitian. Proses ini dilakukan penulis dengan memilah-milah dan menyesuaikan data yang penulis dapatkan dari heuristik dengan tema yang akan penulis kaji, dan arsip atau data yang diperoleh penulis telah diketahui keasliannya.
3. Interpretasi, pada bagian ini setelah mendapat fakta-fakta yang diperlukan maka kita merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal, dalam hal ini penulis berupaya untuk menganalisis data dan fakta yang telah diperoleh dan dipilah yang sesuai dengan kajian penulis.
4. Historiografi, adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian, dalam hal ini penulis membuat laporan hasil penelitian berupa penulisan skripsi dari apa yang didapatkan penulis.

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan variable adalah obyek suatu penelitian atau segala sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsini Arikunto, 2002 : 91). Menurut Mohammad Nasir, variable adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Mohammad Nasir, 1984:149).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek yang menjadi bahan penelitian. Dalam hal ini variabel penelitian juga sering disebut dengan faktor yang berperan dalam suatu peristiwa yang akan kita jadikan obyek penelitian. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable tunggal yaitu pengaruh dari

Tragedi Angke tahun 1740 pada bidang sosial ekonomi di Batavia.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti maka, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber data yang diperlukan dari perpustakaan, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Koentjaraningrat menyatakan bahwa studi pustaka merupakan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan misalnya, koran, naskah, majalah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983:420).

Oleh karena dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah maka kegiatan studi pustaka atau teknik kepustakaan ini menjadi sangat penting terutama dalam penelitian kualitatif (Nawawi, 1993:133). Melalui studi pustaka ini penulis berusaha mengumpulkan berbagai macam informasi yang menunjang dalam penyelesaian masalah, selain itu melalui studi pustaka ini terdapat teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang akan dapat dianalisis oleh penulis dan akan dijadikan landasan penelitian.

Menurut Suharsini Arikunto teknik dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda (Suharsini Arikunto, 1989:188). Menurut Hadari Nawawi, teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. (Hadari Nawawi, 1993:134).

Dari pendapat para ahli di atas, dalam melakukan pengumpulan data tidak hanya menggunakan bahan-bahan berupa literatur atau buku-buku yang ada di perpustakaan,

tetapi juga peneliti harus mencari bukti-bukti atau sumber-sumber yang lain berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti atau arkeologi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya. (Nawawi, 1993: 174). Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Menurut tulisan dari Miles dan Huberman yang dikutip H.B. Sutopo, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:

1. Reduksi data yaitu sebuah proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan di lapangan. reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu serta mengorganisir data sampai akhirnya bisa menarik kesimpulan.
2. Penyajian data yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam penganalisis atau mengambil tindakan nantinya akan berdasarkan pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.
3. Verifikasi data yaitu menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data sudah diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaannya dan kebenarannya (H.B. Sutopo, 2006: 113).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak akhir abad 16, bangsa Eropa terutama Inggris dan Belanda mulai menunjukkan minatnya di wilayah Asia Tenggara serta melakukan beberapa pelayaran ke wilayah ini, dan pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan *Verenigde Oost-Indische Compagnie-VOC* (Perkumpulan Dagang India Timur), yaitu suatu kongsi (persekutuan) para pedagang Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan didirikannya VOC seperti yang diungkapkan Oldenbarneveldt ada dua yaitu “Guna menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air” (Boxer, 1983 : 9).

Setelah berhasil merebut kota Jayakarta, Jan Pieterzoon Coen berhasil mendirikan sebuah *Volkomen Colonie*, yaitu sebuah tanah air kedua bagi Belanda. Pada awalnya, Coen ingin menamakan kota ini sebagai *Nieuwe Hollandia*, namun *de Heeren Seventien* di Belanda memutuskan untuk menamakan kota ini menjadi Batavia (Andriani, 2007 : 24).

Keputusan ini mengganti nama kota menjadi Batavia diusulkan untuk mengenang bangsa *Batavir*, yaitu bangsa Germania yang bermukim di tepi Sungai Rhein yang kini dihuni oleh orang Belanda. Kata Batavia itu sendiri berarti *Bato's Have*, atau tempat tinggal Bata, yaitu pahlawan suku, dan nama Batavia ini digunakan oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun. (Wijayakusuma, 2005 : 60).

Secara geografis, Kota Batavia terletak di pesisir Utara Laut Jawa yang berada di tepi muara Sungai Ciliwung dan terbelah menjadi 2 bagian oleh Sungai Ciliwung (*Grote Rivier*). Masing-masing bagian dipisahkan oleh 2 buah parit serta terdapat 8 buah jalan yang lebarnya sekitar sembilan meter. Kota ini jika dilihat dari atas, berbentuk bujur sangkar dengan panjang kira-kira 2.250 meter dan lebar 1.500 meter. Seluruh Batavia dikelilingi tembok karang tinggi dengan 22 baluarti, serta empat buah gerbang yang terhubung dengan jembatan yang melintang di atas parit dalam, yang mengelilingi kota (Blusse, 2004 : 42).

Orang Tionghoa telah berdagang di Batavia dan Banten jauh sebelum kedatangan VOC ke Nusantara dan telah terjadi hubungan baik pada awalnya antara VOC dan orang

Tionghoa. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Blackburn “Beberapa bahkan telah menetap cukup lama untuk menanam tebu dan menyuling arak yang terkenal di kalangan pelaut yang datang. Ketika VOC mulai menjejakkan kakinya di wilayah ini, VOC menjalin hubungan yang baik dengan orang Cina” (Blackburn, 2011: 32).

Gubernur pertama Batavia Jan Pieterzoon Coen, mulai menyadari potensi orang Tionghoa dan pentingnya menjadikan mereka sebagai golongan mayoritas baru, Sehingga prasangka buruk tadi berubah menjadi jauh lebih baik. Hal ini serupa yang ditulis oleh Vermeulen ketika beberapa tahun kemudian Coen menulis “tidak ada bangsa lain yang dapat melayani kita sebaik orang Tionghoa” (Vermeulen, 2010: 7).

Setelah lima bulan VOC menaklukkan Jayakarta, 400 warga Tionghoa yang tinggal di Batavia telah memilih kapiten mereka yaitu Su Ming-Kang alias Ben Con. Blackburn menjelaskan bila perayaan pengangkatan perwira-perwira tersebut sangat meriah, seolah-olah mereka diangkat menjadi *mandarin* (pejabat kekaisaran Cina) oleh kaisar. Adapun gambaran peristiwa pengangkatan tersebut telah diuraikan oleh B. Hoetink (1922) sebagai berikut :

Salah satu perayaan tersebut tercatat melibatkan sebuah prosesi, yang terdiri atas 156 orang Cina pembawa umbul-umbul, 312 budak pembawa lentera, serta 190 Papanger (kelompok milisi – namanya diambil dari tempat asal mereka, yaitu Pampangan di Filipina) yang berjalan paling belakang sambil membawa tembiang dan keris. Prosesi tersebut juga diiringi oleh sebuah kelompok pemusik (Blackburn, 2011: 35).

Sebagaimana sistem pemerintahan yang berada di Batavia, maka kapiten Tionghoa bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah di antara sesama warga Tionghoa, pelaksanaan hukum, pemungutan pajak, menjaga ketertiban di dalam kampung mereka, serta menjadi penghubung antara pemerintah VOC dengan warga Tionghoa (Niemeijer, 2012 : 61).

Sejalan dengan perkembangan Batavia yang pesat, dan meluasnya kekuasaan VOC pada saat itu, membuat VOC memberikan tanah kepada orang yang dianggap berjasa, atau orang yang bermaksud membelinya. Hal ini menyebabkan banyak warga Cina yang membeli/menyewa tanah kepada VOC untuk membuka perkebunan tebu, yang saat itu keuntungannya sangat menjanjikan (Wijayakusuma, 2005 : 65).

Dibukanya banyak perkebunan dan pabrik tebu di Batavia memicu banyaknya kedatangan etnis Tionghoa ke Batavia. Dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Niemeijer sebagai berikut :

Kebutuhan VOC akan tenaga terampil dan pajak dari orang Tionghoa yang tinggal di Batavia terpenuhi, sementara pelaut Tionghoa memetik keuntungan dari pembebasan pembayaran jalan laut yang dikuasai VOC. Pedagang Tionghoa juga mendapat harga bersaing untuk kain sutera dan porselen yang dibawa. Para tokoh Tionghoa juga menjadi pemborong pembangunan benteng-benteng di Batavia (Niemeijer, 2012: 62).

Perkembangan pabrik gula, kesuksesan banyak warga Tionghoa yang merantau ke Batavia, serta kemajuan kota Batavia, pada waktu itu menyebabkan makin banyaknya warga Tionghoa untuk mengadu nasib di Batavia :

Di daerah sekitar Batavia dan daerah pesisir lainnya yang dikuasai VOC, berkembang industri gula. Hampir seluruhnya industri ini dimiliki oleh orang-orang Tionghoa. Oleh karena kehidupan orang-orang Tionghoa yang bertempat tinggal di Batavia memperoleh banyak kemajuan, sudah barang tentu ini menjadi daya tarik bagi orang-orang Tionghoa lainnya untuk meninggalkan negerinya dan mencoba nasibnya di Pulau Jawa (Setiono, 2008 : 109).

Melihat hal ini pemerintah VOC merasa perlu melakukan pembatasan terhadap kedatangan orang Tionghoa. Pada 21 Mei

1690 VOC mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan kedatangan pasokan dan tempat tinggal bagi imigran Tionghoa ke Batavia (Vermeulen, 2010: 19).

Meskipun telah ditetapkan berbagai kebijakan, namun kedatangan para imigran Tionghoa ini ke Batavia tetap saja terjadi. Hal ini dikarenakan pada mulanya, pemerintah VOC merasa takut kehilangan bea cukai dari *jung-jung* (kapal Cina) Tionghoa yang berlabuh ke Batavia, sehingga pengawasan mereka lebih longgar.

Vermeulen menerangkan bila hal inilah yang menyebabkan para opir Tionghoa dan pegawai pemerintah yang bertanggung jawab terhadap *jung-jung* yang berlabuh, lebih banyak “mengurusi kepentingan pribadi” (Vermeulen, 2010: 19).

Adanya rasa takut akan kehilangan perdagangan dengan Cina juga menyebabkan penerapan dari peraturan 21 Mei 1690 tadi tidak efektif. Sehingga di tahun-tahun berikutnya, pemerintah VOC tidak menerapkan peraturan ini bila hubungan dagang antara Cina dan Belanda tengah sepi.

Dari sini dapat dipahami oleh karena laju migrasi orang Tionghoa ke Batavia terus berlangsung walaupun telah ada larangan dari VOC, maka imigran yang sampai ke Batavia setelah melalui “kompromi” statusnya menjadi illegal. Karena imigran-imigran ini tidak terdaftar, maka pajak perorangan tidak perlu di bayarkan. Dibukanya banyak lahan perkebunan bagi industri ini gula telah menyebabkan dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk menjalankan pabrik-pabrik tersebut. Hal ini menyebabkan banyak pemilik perkebunan yang mempekerjakan para imigran tersebut karena tergiur oleh upah yang lebih murah. Dapat dipahami disini bila pemilik perkebunan tadi memperoleh imigran tersebut setelah melalui “kompromi” melalui petugas yang bersangkutan.

Dapat dimengerti bila hal ini menguntungkan para pengusaha pabrik gula yang memiliki banyak kuli illegal dari Tionghoa, tadi sehingga proses saling menguntungkan ini terus berlangsung. Blusse juga menjelaskan bila para *pothia* (orang Cina pemilik perkebunan tebu) kemudian lebih

memilih mencari “kompromi” dengan para personil sherif, yang bersedia bermain untuk imbalan suap-menyuap yang mereka terima (Blusse, 2004 : 165).

Awal abad ke-18, kondisi perekonomian Batavia kian memburuk sebagai akibat dari kekalahan VOC dalam bersaing dengan Maskapai Perdagangan Inggris, *The British East India Company* (EIC) yang berpusat di Calcuta, India. Hal ini terjadi karena tiba-tiba harga gula di pasaran internasional menurun drastis.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Leonard Blusse, sebagaimana berikut ini :

Kenaikan permintaan sebentar di pasaran Eropa terjadi antara 1712 dn 1716, tetapi sesudah itu kembali merosot. Jatuhnya dinasti Sofi di Persia tahun 1722 berarti hilangnya langganan kompeni di Asia. Hanya sejak 1734 penjualan antar Asia pulih kembali, yaitu sesudah Malabar tampil menggantikan kedudukan Persia sebagai langganan. Perdagangan gula sudah tidak lagi merupakan usaha yang menguntungkan bagi kompeni saat itu, dan sudah tentu para produsen gula Cina itulah pihak pertama yang menanggung rekening-rekeningnya (Blusse, 2004 : 169).

De Jonge (1862) juga menambahkan bila kemunduran VOC ini juga disebabkan oleh politik permainan harga yang dilakukan pemerintah Batavia, yang disebutnya dengan “*de handelstaktiek van den kleinenkruidenier*” (politik dagang kelontong) (Blusse, 2004 : 167).

Dalam hal ini, ketika permintaan akan gula menurun, VOC menyesuaikan harga pembelian serta kuantitas produk sesukanya hingga merugikan perkebunan-perkebunan gula tadi. Kenyataan bahwa gula yang diproduksi EIC lebih murah ketimbang gula VOC, serta menghilangnya beberapa pelanggan VOC, menambah buruknya situasi ekonomi Batavia. Di sisi lain, mulai terjadi ketegangan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi antara pemilik perkebunan Tionghoa yang dirugikan dengan VOC.

Kemunduran ekonomi Batavia ini telah memaksa banyak pengusaha dan pemilik perkebunan tebu gulung tikar, sehingga banyak kuli-kuli Tionghoa yang menjadi pengangguran dan menjadi Kriminal terutama di luar Batavia. Valentijn menyebutkan bila pada Agustus 1713 segerombolan Tionghoa sebanyak 150 orang membuat jalan-jalan di luar kota pada malam hari tidak aman (Vermeulen, 2010: 25).

Untuk mengatasi kriminalitas yang terjadi di Batavia ini, VOC lantas menerapkan beberapa kebijakan yang justru memberatkan orang Tionghoa, diantaranya adalah dikeluarkannya “Surat Ijin Tinggal” pada 10 Juni 1727.

Bagi orang Tionghoa yang tidak memiliki surat tersebut, akan mendapat hukuman berupa penangkapan dan dideportasi ke Tiongkok atau dibawa ke Ceylon (Srilanka) untuk kerja paksa. Vermeulen mengatakan bila hal ini juga berlaku terhadap warga Tionghoa yang telah menetap 10-12 tahun namun tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Tinggal (*permissiebrieffe*) tersebut (Vermeulen, 2010: 38).

Sejak akhir 1739 dan awal 1740, mulai muncul keributan akibat ketidakpuasan di kalangan Tionghoa di sekitar Batavia. Salah satu peristiwa yang memicu kerusuhan dijelaskan oleh Daradjadi ketika menjelang Februari 1740, saat orang-orang Tionghoa merayakan Imlek. VOC melakukan penangkapan terhadap 100 lebih warga Tionghoa yang dicurigai tidak memiliki Surat Izin Menetap (Daradjadi, 2013 : 30).

Hal ini menimbulkan reaksi keras dari warga Tionghoa. Tanggal 7 Oktober 1740, pasukan Tionghoa menyerang pos-pos VOC di Meester Cornelis dan De Qual. Pasukan VOC yang sedang dalam perjalanan ke Kaduwang (Kedawung) Tangerang, juga diserang pasukan Tionghoa. Sebanyak 16 serdadu VOC tewas. Sore harinya pasukan Tionghoa mengambil posisi dekat gerbang kota Batavia. (Daradjadi, 2013 : xxix).

Menjelang tanggal 9 Oktober 1740, kerumunan pemberontak Tionghoa telah sampai di gerbang kota Batavia. Namun pada pukul 8 pagi, VOC di bawah pimpinan

anggota *Raad van Indie* (Dewan Hindia), von Imhoff dan van Aerden berhasil mengalahkan orang Tionghoa setelah meriam-meriam Belanda ikut ambil bagian (Vermeulen, 2010: 61).

Selain membunuh banyak warga Tionghoa, dalam operasi tersebut banyak orang Tionghoa tertangkap, dan oleh von Imhoff mereka diperintahkan agar segera dinaikkan ke kapal yang berangkat menuju Ceylon. Hal ini memunculkan desas-desus bila tahanan tadi akan dibuang ke laut. Terpancing dengan isu tersebut, banyak kuli Tionghoa mempersenjatai diri mereka dan mulai mengadakan perlawanan.

Gubernur Jenderal Adrian Valckenier kemudian mengerahkan kekuatan militernya untuk memadamkan pemberontakan. Mona Lohanda (1944) menjelaskan bila VOC juga membujuk dan mengintimidasi semua penduduk Batavia, untuk ikut menumpas pemberontakan orang Tionghoa, sehingga seluruh golongan masyarakat Batavia sama-sama memburu orang Tionghoa, dimana orang Eropa dan golongan budak adalah yang paling banyak membunuh (Daradjadi, 2013 : 36).

Sejak tanggal 22 Oktober, telah diumumkan kondisi di dalam kota sudah reda, dan pengejaran terhadap warga Tionghoa yang memberontak di luar tembok kota terhenti pada bulan November. Setelah tragedi ini terjadi, kondisi ekonomi Batavia menjadi hancur, sehingga VOC mengeluarkan instruksi akan memberikan pengampunan umum kepada warga Tionghoa yang selamat, serta penghentian peraturan surat izin (Wijayakusuma, 2005 : 112).

Warga Tionghoa yang tersisa ini kemudian dialokasikan ke suatu tempat yang disebut *Diestpoort*, sekarang bernama Glodok. Warga Etnis Tionghoa yang selamat adalah mereka yang berhasil sembunyi di celah-celah sempit dinding rumah yang tidak ikut terbakar, atau di sejumlah daerah di luar benteng kota. Perlahan-lahan warga etnis Tionghoa yang melarikan diri mulai kembali ke kota (Wijayakusuma, 2005 : 114). Terjadinya Tragedi Angke telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi Batavia, di antaranya adalah berkurangnya masyarakat

Tionghoa di Batavia. Dalam hal ini tidak dapat diketahui berapa pastinya jumlah warga Tionghoa yang menjadi korban dalam insiden ini, maupun jumlah warga Tionghoa yang ada di Batavia pada saat itu.

Mona Lohanda (1944) menguraikan ketika Tragedi Angke benar-benar berakhir tercatat etnis Tionghoa yang selamat sebanyak 3.441 jiwa. Terdiri dari 1.442 pedagang, 935 orang petani, 728 orang pekerja perkebunan dan perkayuan, dan 336 orang pekerja kasar (tukang kayu dan batu) (Daradjadi, 2013: 48).

Meskipun tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah warga Tionghoa yang tewas dalam insiden itu, maupun jumlah populasi Tionghoa sebelum terjadinya Tragedi Angke, dapat disimpulkan bila warga Tionghoa yang terbunuh mencapai lebih dari 10.000 orang. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka hanyalah warga biasa yang mencoba mempertahankan diri dari kemarahan warga etnis lain. Sementara itu korban selamat dari insiden ini hanya sebanyak 3.441 jiwa.

Setelah pembantaian etnis Tionghoa di dalam kota Batavia selesai, kondisi kota Batavia sangat kacau. Peristiwa pembantaian tersebut mempengaruhi kondisi perekonomian di Batavia, karena mayoritas warga Tionghoa yang berperan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Batavia telah tewas atau menghilang. Setiono menambahkan bila aktifitas ekonomi menjadi sepi, juga akibat dari masih banyaknya pedagang Tionghoa yang masih mengurung diri di rumah. Hal ini menyebabkan berbagai kerugian bagi VOC (Setiono, 2008 : 125).

Hampir seketika terjadi kelangkaan barang dan makanan serta menghilangnya komoditas lain akibat distributor yang kebanyakan terdiri dari warga Tionghoa telah menghilang atau terbunuh karena peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Reverhorst yang menulis “Hampir seketika terjadi kekurangan semua barang dan jika ada harganya meningkat dua kali lipat dibanding dulu. Kadangkala tidak ada barang sama sekali”(Vermeulen, 2010: 112).

Secara bertahap, ketakutan akan kekurangan bahan pangan terus berkurang.

Vermeulen menjelaskan hal ini lebih disebabkan oleh adanya sumber makanan dari hasil panen di Jawa, dan kedatangan 2 kapal dari Bengkulu yang mengangkut 382 *weight* beras, pada 14 Januari 1743. Walaupun harga pangan masih tinggi, namun tidak ada lagi bahaya kekurangan pangan (Vermeulen, 2010: 114).

Perlu dipahami disini bahwa terjadinya Tragedi Angke otomatis menghentikan pasokan barang ke Batavia untuk sementara, sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan barang-barang pokok di Batavia. Diantaranya ialah terjadinya kelangkaan pangan di Batavia. Fenomena ini menyebabkan terjadinya bahaya kelaparan di kota Batavia. Terlebih lagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelaparan dengan cara meminta kiriman beras tidak berhasil, akibat dari masih adanya gerakan pemberontak Tionghoa di Jawa.

Hal ini menyebabkan VOC terpaksa mengimpor bahan makanan dari Bengkulu dan Sumatera. VOC juga mengeluarkan kebijakan agar stok bahan makanan yang ada cukup selama menunggu datangnya kiriman bahan makanan. Selain adanya kelangkaan makanan, terjadinya kelangkaan dan penurunan produksi gula adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena perdagangan komoditas ini sebagian besar berada di tangan orang Tionghoa.

Pemerintah mengirim surat ke Negeri Belanda pada 10 Januari 1741 bila dari 82 pabrik yang masih beroperasi, hanya mampu memproduksi kebutuhan gula sebesar 8.200.000 pound, sementara konsumsi gula di Belanda dan Hindia mencapai 7.821.144 pound. Dalam laporan ini pemerintah diberitahu bila tidak mungkin menjual gula dengan harga lama. Oleh karena ketidakmampuan VOC dalam memenuhi kebutuhan permintaan Belanda, maka mereka mulai mempersilahkan orang Tionghoa untuk memperbaiki pabrik gula dan menggiling batang tebu yang masih tumbuh di kebun (Vermeulen, 2010: 114-115).

Akibat dari cukup banyak pabrik gula yang terbakar, pada 6 November 1741 VOC memberitahu negeri Belanda bila “penurunan harga gula oleh Heeren XVII sudah tidak ada

lagi.” Vermeulen menjelaskan bila hal ini diakibatkan hancurnya semua pabrik gula di sekitar kota Batavia, sementara perbaikan yang dilakukan hanya mampu memperbaiki dua atau tiga pabrik untuk dapat beroperasi kembali (Vermeulen, 2010: 114).

Oleh karena banyaknya pabrik gula di sekitar Batavia yang terbakar, maka pemerintah VOC sempat memberikan keluluasaan. Sejak tanggal 2 Desember 1741, semua orang diperkenankan untuk mengoperasikan pabrik gula dan penyulingan arak, yang sebelumnya dioperasikan oleh orang Tionghoa.

Meskipun demikian karena tingginya harga barang dan adanya kelangkaan bahan material untuk memulihkan usaha-usaha ini, maka baik dalam pelaksanaannya serta hasil yang diperoleh menjadi kurang memuaskan. Terjadinya Tragedi Angke juga mengurangi pendapatan *pacht* (pajak) di Batavia, hal ini dikarenakan sebagian petani penyewa adalah orang Tionghoa. Beberapa *pacht* yang meliputi pajak kepala, rumah perjudian dan arena adu ayam tidak dapat dilanjutkan karena berkurangnya jumlah warga Tionghoa.

Adanya penurunan pemasukan antara tahun 1740 dengan tahun 1741 yang terjadi di seluruh bentuk pajak yang dibebankan VOC pada warga Tionghoa. Selain itu beberapa pajak seperti pajak kepala yang dibebankan pada tiap warga Tionghoa otomatis tidak dapat diberlakukan kembali, karena berkurangnya warga Tionghoa.

Pemerintah Kolonial mencoba mengubah durasi *pacht* adu ayam dan rumah judi menjadi 8 bulan hingga akhir tahun guna mengembalikan kondisi keuangan. Namun Vermeulen menjelaskan bila peningkatan pemasukan baru terlihat pada tahun 1742 dan 1743. Hal ini sebagian besar dikarenakan warga Tionghoa mulai terlibat dalam bisnis, meskipun jumlah mereka masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan sebelum pembantaian terjadi (Vermeulen, 2010 : 121).

Meskipun kurangnya data akurat yang menjelaskan mengenai jumlah penduduk Tionghoa di Batavia sebelum peristiwa ini dan jumlah korban yang tewas dalam tragedi itu, setelah Tragedi Angke benar-benar berakhir

tercatat etnis Tionghoa yang selamat sebanyak 3.441 jiwa. Terdiri dari 1.442 pedagang, 935 orang petani, 728 orang pekerja perkebunan dan perkayuan, dan 336 orang pekerja kasar (tukang kayu dan batu).

Adapun jumlah korban yang tewas dalam tragedi ini diperkirakan lebih dari 10.000 orang. Meskipun perlahan-lahan warga etnis Tionghoa yang melarikan diri mulai kembali ke kota, namun hal ini belum dapat memulihkan kondisi Batavia seperti sedia kala. Berkurangnya masyarakat Tionghoa secara tiba-tiba, serta masih enggan nya warga Tionghoa untuk berdagang kembali ke Batavia telah menimbulkan masalah dalam distribusi barang, sehingga terjadi kenaikan harga dan hilangnya komoditas lain di Batavia akibat distributor yang kebanyakan terdiri dari warga Tionghoa telah menghilang.

Di antara permasalahan kelangkaan barang di Batavia masalah kelangkaan pangan adalah salah satu yang paling parah pada saat itu. Dalam hal ini penulis telah mencoba untuk memperoleh data terkait gambaran aktifitas distribusi barang dan bahan makanan ke Batavia, baik sebelum dan sesudah peristiwa Tragedi Angke, maupun mengenai jumlah warga Tionghoa yang berprofesi sebagai pedagang pada waktu itu guna mengetahui informasi ini lebih jauh. Namun, oleh karena keterbatasan sumber daya, penulis belum mampu memperoleh data tersebut.

Warga kota Batavia yang terbiasa mampu memperoleh barang di pasar, menghadapi suatu permasalahan baru yaitu kelangkaan bahan-bahan pokok. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah guna menyelesaikan masalah ini dengan cara meminta pengiriman beras dari Jawa terganggu akibat dari adanya perlawanan warga Tionghoa. Faktor-faktor inilah yang juga turut menyebabkan terjadinya kelangkaan makanan di Batavia pada saat itu dapat berlangsung selama beberapa tahun.

Selain adanya kelangkaan makanan, juga terjadi kelangkaan dan penurunan produksi gula. Hal ini dikarenakan perdagangan komoditas ini sebagian besar berada di tangan orang Tionghoa. Oleh karena banyaknya pabrik gula di sekitar Batavia yang terbakar, maka pemerintah VOC sempat memberikan

keluluasaan yaitu sejak tanggal 2 Desember 1741, semua orang diperkenankan untuk mengoperasikan pabrik gula dan penyulingan arak, yang sebelumnya dioperasikan oleh orang Tionghoa. Tingginya harga barang dan adanya kelangkaan bahan material untuk memulihkan usaha-usaha ini, maka baik dalam pelaksanaannya serta hasil yang diperoleh menjadi kurang memuaskan.

Sangatlah jelas bila pada waktu itu telah terjadi penurunan perdagangan gula yang menyebabkan VOC tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar Eropa, dan tidak mampu untuk menjual gula dengan harga yang lama. Hal ini diakibatkan banyak pabrik yang rusak dan kehilangan pegawainya.

Selain dari dampak di atas, Tragedi Angke juga mengurangi pendapatan *pacht* (pajak) di Batavia, hal ini dikarenakan sebagian petani penyewa adalah orang Tionghoa. Oleh karena hampir setiap jenis pajak yang ada di Batavia dibebankan pada warga Tionghoa, maka secara otomatis berkurangnya warga Tionghoa secara drastis mempengaruhi pemasukan pajak (*pacht*) di Batavia, terutama pada tahun 1741.

Penulis berpendapat bila di antara sekian banyak sektor pajak yang dibebankan pada warga Tionghoa, pajak yang paling terkena dampak dari Tragedi ini adalah pajak kepala. Pajak ini dibebankan kepada warga etnis Tionghoa sebesar 1 rial perbulannya, meskipun karena keterbatasan data penulis belum mampu mengetahui apakah pajak ini juga berlaku kepada anak-anak, ataukah ada kebijakan-kebijakan lain yang terkait pada sektor pajak ini. Dapat disimpulkan bila berkurangnya warga Tionghoa akibat Tragedi Angke, telah membuat sektor pajak ini menjadi tidak efektif, sehingga belum mampu diterapkan lagi hingga di tahun-tahun mendatang.

Peningkatan pemasukan baru terlihat pada tahun 1742 dan 1743 dikarenakan warga Tionghoa mulai terlibat dalam bisnis, meskipun jumlah mereka masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan sebelum pembantaian terjadi. Pada tahun 1744, diperkenalkan *pacht* baru yakni pabean (bea cukai) yang menunjukkan telah membaiknya

perdagangan. Data-data juga menyebutkan bila setelah tahun 1744, tepatnya pada masa pemerintahan Gustaaf of William Baron von Imhoff posisi warga Tionghoa semakin baik. Mereka mulai kembali diizinkan untuk kembali memasuki koloni dan diizinkan keluar masuk kota secara bebas sebagaimana sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya pembantaian massal 1740 (Tragedi Angke) telah membawa pengaruh buruk pada bidang sosial-ekonomi di Batavia yang meliputi :

1. *Berkurangnya masyarakat Tionghoa sebagai kelas sosial di Batavia.* Masyarakat Tionghoa telah menjadi golongan yang penting bagi perekonomian Batavia, baik itu berperan sebagai pedagang perantara, maupun sebagai pemilik perkebunan tebu.
2. *Terjadinya kekurangan pangan di Batavia.* Berkurangnya masyarakat Tionghoa secara tiba-tiba, telah menimbulkan masalah dalam distribusi barang, sehingga terjadi kenaikan harga dan menghilangnya komoditas lain di Batavia akibat distributor yang kebanyakan terdiri dari warga Tionghoa telah terbunuh atau menghilang.
3. *Terjadinya penurunan produksi gula di Batavia.* Selain adanya kelangkaan makanan, juga terjadi kelangkaan dan penurunan produksi gula, dikarenakan perdagangan komoditas ini sebagian besar berada di tangan orang Tionghoa.
4. *Menurunnya pendapatan *pacht* (pajak) di Batavia.* Hal ini dikarenakan sebagian petani penyewa adalah orang Tionghoa dan hampir setiap jenis pajak yang ada di Batavia yang dibebankan pada warga Tionghoa terutama pajak kepala, maka secara otomatis berkurangnya warga Tionghoa secara drastis menyebabkam

menurunnya pendapatan pajak (*pacht*) di Batavia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Eni. 2007. *Pemberontakan Orang-orang Cina Melawan VOC di Muara Angke, Batavia Tahun 1740*. (Skripsi tidak dipublikasikan) Bandar Lampung: Universitas Lampung. 105 halaman.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 274 Halaman.
- Blackburn, Susan. 2011. *Jakarta : Sejarah 400 Tahun*. Jakarta : Masup Jakarta. xxiv + 392 Halaman.
- Blusse, Leonard. 2004. *Persekutuan Aneh : Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC* (Terjemahan Abdul Rozaki). Yogyakarta : PT Lkis Pelangi Aksara. 532 Halaman.
- Boxer, C. R. 1983. *Jan Kompeni : Sejarah VOC Dalam Perang dan Damai 1602-1799*. Jakarta : Sinar Harapan. 114 Halaman.
- Daradjadi. 2013. *Geger Pacinan 1740-1743 Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara. 292 halaman.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah* (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto). Jakarta : Yayasan Penerbit UI
- H.B. Sutopo 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 376 Halaman.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Gramedia. 245 Halaman.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 544 Halaman.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Idayu Press. 250 Halaman.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Inti Indayu Press : Jakarta. 392 Halaman.
- Remmelink, Willem. G. J. 2002. *Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa, 1725-1743*. Yogyakarta. Bukit Jendela. xxx + 404 Halaman.
- Setiono, Benny. G. 2008. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta. Transmedia. xxii + 1142 Halaman.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 145 Halaman.
- Vermeulen, Johannes. Th. 2010. *Tionghoa di Batavia dan Huru-hara 1740* (diterjemahkan oleh Gatot Triwira). Jakarta. Komunitas Bambu. xxx + 146 Halaman.
- Wijayakusuma, Hembing. 2005. *Pembantaian massal 1740 : Tragedi berdarah Angke*. Jakarta : Pustaka Populer Obor. 252 Halaman.